

**RESPONSIVITAS GENDER DALAM PROSES PEMBERDAYAAN
OLEH YAYASAN ANNISA SWASTI (STUDI PADA SEKOLAH KEPEMIMPINAN
BURUH GENDONG PASAR BERINGHARJO)**

Pradita Debby Mutiara¹

ABSTRACT

This research aims to analyze benefits gained by carrying workers, and how gender responsiveness in the activities of the Sekolah Buruh Gendong operated by Yayasan Annisa Swasti (Yasanti). The research method used was descriptive qualitative with Longwe analysis technique. The result of the research showed that the leadership school of the workers has provided the benefit of structured access to education for 25 women workers, so that this activity increases the capacity of the carrying workers. Through Langwe's analytical techniques, the upgrading of the carrying women capacity has led to a critical awareness and participation of the carrying workers about their existence, both as a woman and as a worker. Critical awareness creates courage to speak so that they can hold an audience with members of the Yogyakarta City House of Representatives and two (2) workers have become the paralegal representatives in LBH (Legal Aid Institute). However, the school activities have not guaranteed the carrying workers' economic welfare and also have no control over health insurance or social protection.

Keywords: *Gender Responsiveness, Longwe Analysis, and Yasanti*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat yang diperoleh buruh gendong, serta bagaimana responsivitas gender pada kegiatan Sekolah Buruh Gendong yang dilakukan oleh Yasanti. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis Longwe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah kepemimpinan buruh gendong telah memberikan manfaat berupa akses pendidikan secara terstruktur kepada 25 orang buruh gendong perempuan, sehingga kegiatan ini meningkatkan kapasitas buruh gendong. Melalui teknik analisis Langwe, peningkatan kapasitas buruh gendong telah melahirkan kesadaran kritis dan partisipasi dari para buruh gendong tentang eksistensi mereka, baik sebagai perempuan maupun sebagai seorang pekerja. Kesadaran kritis melahirkan keberanian berbicara sehingga buruh gendong mengadakan audiensi dengan anggota DPRD Kota Yogyakarta serta dua (2) orang buruh gendong menjadi perwakilan paralegal di LBH (Lembaga Bantuan Hukum). Namun, kegiatan sekolah buruh gendong belum menjamin kesejahteraan ekonomi dan mereka juga tetap tidak memiliki kontrol terhadap jaminan kesehatan maupun perlindungan sosial.

Kata Kunci: Responsivitas Gender, Analisis Longwe, dan Yayasan Annisa Swasti

¹ Analis, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
email: pradyut_1604@yahoo.com

PENDAHULUAN

Kehidupan perekonomian di pedesaan yang tidak menentu menyebabkan arus migrasi dari desa ke kota semakin sulit untuk dibendung. Salah satu dampak migrasi adalah munculnya buruh gendong yang terdapat di beberapa pasar tradisional Kota Yogyakarta.

Buruh gendong merupakan salah satu pilihan pekerjaan yang diambil oleh para migran untuk berusaha menyambung hidup mereka di daerah perkotaan. Buruh gendong biasanya merupakan sosok perempuan lanjut usia yang menyandang selendang jarit lurik (kain bermotif lurik) dan menenteng srumbung di punggungnya. Sebagian besar buruh gendong hanya menggunakan jarit lurik untuk menggendong barang yang relatif besar, sedangkan srumbung digunakan untuk membawa barang-barang yang relatif kecil (Hidayah, 2007).

Sebagai salah satu pasar terbesar di Kota Yogyakarta, jumlah buruh gendong di pasar Beringharjo selalu mengalami peningkatan. Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pasar, buruh gendong perempuan yang terdaftar di dalam paguyuban pada tahun 2009 adalah sebanyak 459 orang, sedangkan yang tidak tergabung masih banyak lagi (Dinas Pengelola Pasar Kota

DIY, 2009 dalam Prahara, 2010). Selama ini sebagian besar buruh gendong merasa nyaman dalam menjalankan pekerjaannya. Meskipun secara medis terdapat beberapa resiko penyakit yang mengintai mereka. Resiko cedera, seperti keseleo dan nyeri punggung merupakan resiko penyakit seringkali diderita oleh buruh gendong perempuan. Selain itu bagi buruh gendong perempuan, jenis pekerjaan ini juga menjadi ancaman terhadap sistem kesehatan reproduksi mereka (Susanto et al., 2013).

Melihat kondisi buruh yang memprihatinkan, Yasanti (Yayasan Annisa Swasti) sebagai organisasi sosial yang telah berdiri sejak tahun 1982 ini memiliki misi untuk mendorong usaha-usaha mewujudkan kehidupan berorganisasi buruh yang independen dan demokratis, serta menumbuhkan kesadaran kritis komunitas buruh khususnya buruh perempuan melalui pengorganisasian, pendidikan, dan advokasi. Demi mewujudkan misi tersebut, ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yasanti selama ini. Salah satu kegiatan yang telah berjalan pada tahun 2014 adalah “Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong”. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk

memberikan pendidikan dan pelatihan berupa pengorganisasian, penyadaran gender, kepemimpinan, kewirausahaan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain (Yasanti, 2003).

Selama ini sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang kondisi pekerja perempuan di sektor informal. Secara garis besar penelitian-penelitian tersebut dapat dibagi ke dalam tiga kecenderungan utama. *Pertama*, penelitian-penelitian yang menganalisa pengaruh globalisasi yang semakin memperparah posisi perempuan pada pembagian kerja baik secara global maupun nasional, serta mengakibatkan ketidaksetaraan gender dalam mengakses aset dan kekuasaan. Hal ini memengaruhi pembagian kerja pada level rumah tangga, sehingga membuat perempuan yang memiliki peran domestik dan reproduksi hanya mampu bekerja di sektor informal (Omoyibo dan Ajayi, 2011; Oberhauser dan Yeboah, 2011; Oberhauser, 2010). *Kedua*, penelitian-penelitian yang memandang bahwa perempuan yang bekerja di sektor informal pada kenyataannya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menjadi salah satu faktor penting keberhasilan negara bersaing dalam era globalisasi (Ganu dan Boateng,

2012; Fapohunda, 2012; Singh, 2013; Arora, 2012; Horn, 2010; Anaeto dan Asoegwu, 2013; Fonjong, Fombe dan Lang, 2013). *Ketiga*, adalah penelitian-penelitian yang memberikan saran bahwa kebijakan berperspektif gender sangat dibutuhkan guna memberikan perlindungan sosial bagi perempuan yang bekerja di sektor informal (Oberhauser dan Yeboah, 2011; Ganu dan Boateng, 2012; Horn, 2010; Mahmood, et al, 2014).

Yasanti sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang memiliki perhatian terhadap nasib buruh, telah memiliki berbagai macam pengalaman yang bersinggungan dengan kehidupan para buruh gendong secara langsung. Dengan demikian, informasi tentang bagaimana responsivitas gender pada setiap kegiatan yang pernah dilakukan oleh Yasanti menjadi penting untuk dilakukan. Evaluasi terhadap proses pendampingan buruh gendong perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana level keberdayaan dari perempuan yang selama ini telah mendapatkan program/kegiatan penguatan serta bekerja di sektor informal. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Yasanti, yaitu Sekolah Buruh Gendong dengan menggunakan teknik analisis Longwe

sebagai alat analisisnya. Dengan melihat apakah kegiatan tersebut memang telah responsif gender dalam arti mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan perempuan buruh gendong yang dianggap rentan. Misalnya bagaimana partisipasi aktif, peningkatan kesejahteraan, keberdayaan, serta posisi tawar mereka sebagai tenaga kerja sektor informal setelah adanya kegiatan ini. Perspektif gender sangat diperlukan sebagai alternatif untuk melihat apakah kegiatan tersebut memang sudah memasukkan pengalaman perempuan secara subyektif, ataukah malah masih bias gender.

Konsep Civil Society

Konsep *civil society* selalu berkaitan dengan *Good Governance*. Pemerintah tidak lagi hanya berperan sebagai pengontrol, tapi juga sebagai fasilitator ataupun koordinator. Menurut Lembaga Administrasi Negara, *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergian” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Fukuyama menegaskan bahwa peran negara bukanlah institusi *super power* yang mampu melakukan seluruh fungsi dengan sendirian. Keterlibatan *civil society* merupakan komponen penting dalam membantu tugas negara serta menentukan kualitas *governance*.

Konsep *civil society* dalam konsepsi Gramsci merupakan pemahaman yang mencakup seluruh aparatus transmisi yang lazim disebut universitas, LSM, media massa, gereja, sekolah, serikat dagang, partai politik, dan asosiasi budaya yang berbeda dari proses produksi dan aparaturnegara (Subono, 2003)

Civil society selalu identik dengan gerakan sosial yang berusaha meningkatkan kesadaran melalui upaya pendidikan. Dan gerakan sosial selalu membawa dampak perubahan signifikan terhadap struktur sosial masyarakat yang ada selama ini. Pada konsep yang lebih luas, *civil society* didefinisikan sebagai berikut: *Civil society* ditujukan pada arena aksi kolektif yang bersifat non-koersi di antara beberapa pihak yang berbagi kepentingan, tujuan, dan nilai. *Civil society* seringkali berisi organisasi-organisasi kemanusiaan, organisasi non-governmental, kelompok komunitas, organisasi perempuan, organisasi agama, asosiasi profesional, ikatan perdagangan,

gerakan sosial, asosiasi usaha, koalisi, dan kelompok advokasi (Awan, 2012).

Pekerja Sektor Informal

Era liberalisasi pada saat ini tidak diragukan lagi telah membawa peningkatan angkatan kerja bagi perempuan di belahan dunia manapun. Trend ini secara garis besar telah dipahami sebagai “feminisasi tenaga kerja” (ILO, 2004). Pada saat yang bersamaan menurut Heintz, juga diketahui bahwa perempuan terkonsentrasi pada pekerjaan informal dengan kualitas gaji yang rendah, terutama pada negara yang sedang berkembang (Amrutkar, 2012). Renooy (1990), ekonomi informal adalah pekerjaan yang “tidak memiliki regulasi dan hukum formal, lebih fleksibel dibanding ekonomi formal, berinteraksi dan terfragmentasi dengan ekonomi formal, bergantung pada jaringan sosial/keluarga, dan pendapatan yang pas-pasan” (Rokicka dan Ruzik, 2010).

Globalisasi dan Perspektif Feminisme Marxis

Stiglitz (2006) mengungkapkan bahwa globalisasi merupakan proses yang mencakup berbagai hal yaitu “aliran gagasan dan pengetahuan secara internasional, pemahaman budaya, munculnya kelompok masyarakat dunia,

dan pergerakan masalah lingkungan secara global” (Stiglitz, 2006).

Globalisasi mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak globalisasi yang paling kentara adalah peningkatan perempuan pada angkatan kerja yang dibayar, dibandingkan laki-laki (Standing, 1999). Marchad & Runyan (2000) dan Pyle & Ward (2003) mendeskripsikan bahwa proses global telah mengubah sistem, hubungan serta peran gender dan memperparah kesenjangan gender, namun sekaligus juga menjadi satu kesatuan dari relitas dan ideologi gender. Proses globalisasi memaksa para perempuan untuk keluar dari rumah dan mulai bekerja dengan kemampuan dan keahlian yang sangat minim. Pendidikan dan keahlian yang minim membuat para perempuan tersebut terpaksa bekerja di sektor informal yang tidak terlindungi.

Untuk memahami mengapa globalisasi memiliki dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan, maka peneliti akan menggunakan perspektif Marxis untuk mencari akar penyebabnya. Feminis Marxis percaya bahwa kapitalisme adalah suatu sistem hubungan kekuasaan dan juga hubungan pertukaran (Tong, 2010). Selain itu, feminis Marxis juga memandang bahwa kapitalisme adalah suatu sistem hubungan

kekuasaan, dimana kapitalisme digambarkan sebagai suatu masyarakat yang di dalamnya setiap hubungan transaksional, pada dasarnya adalah eksploitatif. Majikan yang mempunyai kekuasaan lebih besar, mengkoersi pekerja untuk bekerja lebih keras lagi tanpa mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan perbaikan upah. Marx menganggap bahwa sistem kapitalisme yang digunakan diseluruh bagian dunia karena adanya proses globalisasi merupakan sistem yang eksploitatif, karena majikan membayar pekerja hanya untuk kekuatan bekerjanya, tanpa membayar untuk pengeluaran sesungguhnya atas energi dan intelegensi manusia yang diambil dan ditransfer menjadi komoditi yang dihasilkan mereka.

Definisi Gender dan Jenis Kelamin (Sex)

Untuk dapat melakukan analisis gender terlebih dahulu harus dipahami antara pengertian gender dan pengertian seks. Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu.

Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda. Dalam arti perbedaan jenis kelamin, seks mengandung pengertian laki-laki dan

perempuan terpisah secara biologis (Handayani dan Sugiarti, 2008). Sedangkan menurut John and Gordon (2005), "Gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan karena adanya konstruksi sosial" (Boyi, 2013). Sedangkan menurut Cleves (1993), "Gender merupakan satu set peran, seperti kostum dan topeng, untuk diperlihatkan kepada masyarakat bahwa kita adalah feminin atau maskulin." Perbedaan pada peran dan perlakuan gender seringkali menimbulkan kesenjangan dimana salah satu gender menjadi lebih kuat dan yang lain menjadi kurang beruntung (World Health Organization, WHO, 2009). Reeves dan Baden (2000) mengungkapkan bahwa meski tidak disebabkan oleh perbedaan asal daerah, namun kebanyakan kesenjangan gender terjadi di wilayah pedesaan karena disini budaya masih sangat dijunjung tinggi. Budaya dan tradisi seringkali digunakan oleh laki-laki untuk mempertahankan pembatasan akses terhadap potensi perempuan (Gyeke and Owusu, 2013).

Konsep Pemberdayaan Perempuan

Zimmerman dan Rappaport menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan merupakan sebuah "kemampuan individu untuk memperoleh kontrol baik secara sosial, politik, ekonomi, ataupun psikologi

melalui akses terhadap informasi, pengetahuan dan keahlian, pembuatan keputusan, kesadaran diri, partisipasi komunitas, serta kontrol yang dirasakan.” Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kesadaran diri diantara para anggota organisasi melalui identifikasi kondisi ketidakberdayaan melalui upaya untuk menghilangkannya, baik dengan menggunakan teknik formal maupun informal dari organisasi tersebut (Carr, 2011).

Pada dasarnya konsep pemberdayaan menginginkan “perempuan mempunyai kontrol terhadap beberapa sumber daya materi dan non materi yang penting dan pembagian kembali kekuasaan di dalam maupun di antara masyarakat” (Moser, 1989). Moser (1993) menyatakan bahwa strategi pemberdayaan bukan bermaksud menciptakan perempuan lebih unggul dari laki-laki kendati menyadari pentingnya meningkatkan kekuasaan, namun pendekatan ini mengidentifikasi kekuasaan bukan sebagai dalam rangka dominasi yang satu terhadap yang lain, melainkan lebih condong dalam kapasitas perempuan meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal.

Menurut Sumodiningrat (1997), sedikitnya ada tiga aspek yang dicakup dalam memaknai pemberdayaan wanita, yaitu: (1) menciptakan kondisi yang kondusif yang mampu mengembangkan potensi wanita; (2) memperkuat potensi (modal) sosial wanita demi meningkat mutu kehidupannya; (3) mencegah dan melindungi wanita, serta mengentaskan ketertindasan dan kemarginalan segala bidang kehidupan mereka. Sedangkan Kabeer (2001) dalam Mayoux, (2005) menyatakan bahwa terdapat lima unsur utama yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan perempuan, yaitu *welfare* (kesejahteraan), *access* (akses), *consientisation* (konsientisasi), *participation* (partisipasi) dan *equality of control* (kesetaraan dalam kekuasaan).

Strategi Pengarusutamaan Gender untuk Kesetaraan Gender

Perjuangan kesetaraan gender dapat dilihat dari pergeseran strategi dari waktu ke waktu. Darwin (2005), menyebutkan bahwa pada awalnya gerakan perempuan dalam pembangunan (*Women In Development*, disingkat WID) merupakan reaksi kaum feminis terhadap pengkotakan perempuan dalam ranah domestik, dan tidak mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk mengenyam pendidikan serta mengembangkan karir

atau mencari nafkah di luar rumah. Upaya ini memang dapat meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam proses pembangunan, tetapi tidak dalam tingkat keberdayaan mereka. Kelemahan penerapan strategi ini kemudian direspon dengan strategi kedua, yaitu Gender dan Pembangunan (*Gender and Development*, disingkat GAD). Gerakan yang populer pada tahun 1980-an ini, memfokuskan padapersoalan yang lebih mendasar di dalam pembangunan yaitu hubungan gender yang tidak adil. Untuk menyempurnakan GAD, maka muncul lah *Gender Mainstreaming* (GM) atau Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah pematangan dari strategi GAD yang tujuan utamanya adalah menjadikan gender sebagai arus utama (*mainstream*) pembangunan. Sasarannya adalah kebijakan (negara), aksi (masyarakat), serta institusi (negara dan masyarakat) agar menjadi sensitif gender atau menjadikan gender sebagai arus utamanya (Darwin, 2005).

Di Indonesia, upaya mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan telah dilakukan lebih dari satu dasarwarsa. Terbitnya INPRES No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional menjadi satu titik tolak kebijakan yang

sangat penting dalam mendorong upaya tersebut. Kebijakan ini kemudian dipertegas juga dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2011 tentang RPJMN 2010-2014 yang menetapkan gender sebagai salah satu isu lintas bidang yang harus diintegrasikan dalam semua bidang pembangunan (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2011). Meski telah memiliki landasan hukum, namun dapat dilihat bahwa upaya untuk mengarusutamakan gender di Indonesia masih membutuhkan perjuangan yang cukup panjang.

METODE PENELITIAN

Analisis gender diperlukan sebagai sebuah teknik untuk melihat gambaran yang lebih sempurna tentang adanya perbedaan maupun saling ketergantungan laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan, serta adanya perbedaan tingkat manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempuan dari hasil pembangunan. Melalui teknik ini, berbagai kesenjangan maupun isu gender yang terjadi di dalam masyarakat dan lingkungan akan dapat teridentifikasi. Untuk mengungkapkan hubungan sosial laki-laki dan perempuan, maka dikembangkan berbagai macam teknik analisis seperti: Teknik Analisis Harvard, Moser, Longwe, Munro, CVA,

Matriks Analisis Gender, Analisis Logframe, Konsep Seaga dan Teknik Participatory Rural Appraisal Berdimensi Gender serta kerangka Analisis GAP dan POP (Handayani dan Sugiarti, 2008).

Namun di dalam penelitian ini, tidak semua teknik analisis gender akan dijelaskan secara terperinci. Selanjutnya hanya akan dijelaskan tentang teknis teknik analisis Longwe. Teknik analisis Longwe akan digunakan untuk melihat responsivitas gender di dalam kegiatan Sekolah Buruh Gendong yang dilakukan oleh Yasanti. Teknik ini akan digunakan untuk melihat level keberdayaan buruh gendong yang selama ini telah difasilitasi oleh Yasanti. Teknik analisis ini dikembangkan dengan lima kriteria analisis yang meliputi: kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol.

PEMBAHASAN

Proses Pemberdayaan Buruh Gendong oleh Yayasan Annisa Swasti

Salah satu permasalahan mendasar yang menjadi perhatian khusus dari Yasanti adalah mengenai masalah kesehatan. Hingga saat ini jaminan perlindungan atas kerja layak dan akses buruh gendong terhadap sumber-sumber ekonomi masih banyak mengalami

hambatan. Hal tersebut terjadi karena sebagai pekerja, eksistensi mereka sebagai bagian dari warga pasar masih belum diakui secara formal oleh pemerintah. Selain itu kondisi pasar yang tidak representatif terhadap pekerjaan buruh gendong, lantai yang bertingkat-tingkat, lokasi jalan yang sempit dan semrawut seringkali membahayakan buruh gendong saat melakukan pekerjaannya. Sedangkan biaya pengobatan harus mereka tanggung sendiri karena kebijakan BPJS hanya menaungi warga Kota Yogyakarta saja, padahal kebanyakan buruh gendong bukan berasal dari Kota Yogyakarta.

Selain masalah perlindungan kesehatan yang sampai saat ini masih menjadi polemik, masalah lain yang seringkali dihadapi oleh para buruh gendong adalah kondisi pasar yang tidak representatif terhadap keberadaan mereka. Selain itu kondisi parkiran yang simpang siur saat ini juga seringkali mengganggu pekerjaan mereka. Tidak adanya perlindungan sosial bagi buruh gendong lebih terjadi karena pemerintah menganggap telah melakukan upaya maksimal bagi mereka. Pemerintah memang sadar karena buruh gendong mayoritas adalah perempuan maka dibutuhkan perhatian khusus, akan tetapi pemerintah merasa tidak seharusnya

memanjakan buruh gendong. Jika dibandingkan dengan warga pasar lainnya, pemerintah merasa bahwa perlakuan mereka terhadap buruh gendong terlalu berlebihan sehingga seringkali mengakibatkan kecemburuan bagi warga pasar.

Proses Pemberdayaan Buruh Gendong oleh Yayasan Annisa Swasti melalui Kegiatan Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong

Melihat kealpaan negara dalam memberikan perhatian terhadap nasib buruh gendong perempuan, maka Yasanti hadir untuk mengisi celah tersebut. Dengan mengakomodir para buruh gendong perempuan yang bekerja di Pasar Beringharjo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka berusaha untuk kembali meningkatkan kesadaran kaum perempuan akan hak-hak mereka sebagai seorang perempuan maupun sebagai seorang buruh gendong. Dengan harapan bahwa kesadaran tersebut dapat membantu mereka keluar dari permasalahan-permasalahan yang saat ini mereka hadapi. Oleh sebab itu, munculah inisiatif sebuah kegiatan yang dinamakan “Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong”.

Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong merupakan sebuah bentuk

kerjasama antara Yasanti, IWE (*Institute Women Empowernment*) beserta dengan Paguyuban Buruh Gendong untuk mendorong serta memperkuat kapasitas para buruh gendong. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan buruh gendong agar dapat merepresentasikan diri mereka, baik di dalam lingkungan keluarga, komunitas, maupun masyarakat sekitar. Selain itu kegiatan ini juga diharapkan akan mampu memperkuat kapasitas buruh gendong dalam mengakses sumber-sumber ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan mereka yang lebih layak. Di dalam kegiatan ini, upaya penyadaran dilakukan melalui aktivitas belajar mengajar baik di dalam maupun di luar ruangan, guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka sebagai seorang perempuan maupun sebagai seorang buruh gendong. Di sini para buruh gendong dididik untuk menjadi seorang pemimpin yang nantinya diharapkan akan mampu memobilisasi rekan-rekan mereka dalam menyuarakan pendapat, serta menyampaikan praktek-praktek diskriminatif yang pernah mereka terima selama ini.

Kegiatan ini mengikutsertakan 25 orang buruh gendong dari 4 (empat) perwakilan pasar, yaitu Pasar Beringharjo,

Pasar Gamping, Pasar Kranggan, dan Pasar Giwangan. Namun tingkat kehadiran dari para buruh gendong tersebut cukup baik karena sejak awal sudah ada kontrak yang mengikat komitmen mereka. Kegiatan ini juga hanya mengikutsertakan sebagian kecil buruh gendong, karena memang tujuan awalnya adalah untuk memperoleh kader-kader yang nantinya akan berperan menjadi ketua dan kemudian mengajak teman-teman buruh gendong lain yang belum berorganisasi untuk ikut berorganisasi dan ikut menyuarakan pendapatnya.

Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong telah dilaksanakan sejak awal bulan Oktober 2013 hingga pada bulan Mei 2014. Kegiatan ini diisi dengan berbagai macam materi yang disampaikan oleh beberapa fasilitator yang bekerja sama dengan Yasanti. Penyampaian materi dilakukan menggunakan metode induktif agar fasilitator dapat berinteraksi dengan para buruh gendong. Dengan menggunakan metode induktif dan contoh nyata dari pengalaman sehari-hari, para fasilitator berusaha mencari cara untuk meningkatkan kesadaran dari para buruh gendong tersebut. Selain menggunakan metode tersebut fasilitator juga menggunakan metode gambar. Fasilitator

menunjukkan gambar-gambar yang memperlihatkan ketidakadilan bagi perempuan, dan meminta para buruh gendong untuk menceritakan gambar tersebut sesuai pemahaman mereka masing-masing. Selain itu pendekatan *personal approach* juga digunakan untuk mendapatkan kepercayaan dari para buruh gendong.

Capaian Intervensi Pemberdayaan Yasanti pada Buruh Gendong

1. Output

Terdapat 25 buruh gendong perempuan yang mengikuti kegiatan ini. Mayoritas buruh gendong perempuan tersebut berasal dari Sentolo Kulonprogo. Namun, banyak pula yang berasal dari daerah lain. Para buruh gendong dapat mengikuti kegiatan ini karena sejak awal mereka merupakan anggota dari Paguyuban Sayuk Rukun, paguyuban yang menaungi buruh gendong yang ada di pasar Beringharjo dan telah lama menjalin kerja sama dengan LSM Yasanti. Kegiatan Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong dimulai sejak Oktober 2013 hingga Mei 2014.

Dengan menjadi anggota Paguyuban Sayuk Rukun dan mengikuti kegiatan Yasanti, buruh gendong setidaknya mendapatkan beberapa manfaat langsung. Setiap 25 hari sekali,

tepatnya pada Minggu Pon, Yasanti rutin mengadakan acara pengajian di Masjid Pasar Beringharjo. Acara pengajian tersebut biasanya juga disertai dengan pengobatan gratis dan pembagian sembako. Selain beberapa manfaat tersebut, buruh gendong yang mengikuti acara pengajian juga memiliki koperasi simpan-pinjam sederhana.

2. *Outcome*

Outcome di dalam bagian ini adalah mengenai hasil aktual apa saja yang telah diperoleh buruh gendong perempuan setelah mengikuti kegiatan Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong. Adakah perbaikan kondisi dari para buruh gendong sebelum atau sesudah kegiatan ini, seberapa paham mereka tentang materi yang diajarkan, serta pengalaman-pengalaman baru apa saja yang mereka peroleh selama mengikuti kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Yasanti.

Bu Isah sebagai salah satu informan utama mengungkapkan bahwa di Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong beliau mendapat banyak sekali materi ajar seperti tentang gender, hak asasi manusia, kepemimpinan, kewirausahaan, dan lain-lain. Beruntung beliau merupakan lulusan SMP, sehingga bisa baca-tulis dan dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik.

Beliau merasa senang dapat bergabung di paguyuban dan kegiatan tersebut, karena selain mempererat hubungan antara sesama buruh gendong juga sekaligus menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hak nya sebagai perempuan sekaligus sebagai buruh gendong.

Namun, tidak semua buruh gendong perempuan yang ditemui dapat menceritakan tentang apa saja manfaat yang diperoleh selama mengikuti kegiatan sekolah. Ketika ditanya mengenai materi apa saja yang pernah diberikan pada saat Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong, Mbah Giyah mengaku sudah banyak yang lupa. Buruh gendong perempuan yang mengikuti kegiatan Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong mayoritas sudah tidak berusia muda. Mbah Giyah sebagai salah satu peserta sekolah pun sudah berusia 71 tahun. Jadi wajar saja kalau sudah lupa dengan berbagai materi ajar yang diberikan oleh para fasilitator sekolah. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan para buruh gendong, harus diakui bahwa yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai seluk beluk kegiatan sekolah secara mantap hanyalah Bu Isah. Kemudian buruh gendong lain yang dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan sekolah secara lebih detil adalah Bu Satiyem.

Buruh gendong lain hanya sepintas saja mengingat kegiatan tersebut dan tidak terlalu lancar dalam memberikan gambaran seputar kegiatan tersebut.

Selain itu, para buruh gendong yang mengikuti kegiatan Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong juga mengalami pengalaman baru ketika diajak audiensi dengan para anggota DPRD Kota Yogyakarta. Setelah berakhirnya Kegiatan Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong, upaya advokasi terhadap nasib para buruh gendong masih terus dilanjutkan. Pada hari Hak Asasi Manusia Sedunia tanggal 15 Desember 2014, perwakilan buruh gendong dari 4 pasar (Pasar Beringharjo, Pasar Kranggan, Pasar Gamping dan Pasar Giwangan) didampingi dengan Yasanti dan beberapa LSM pendukung lainnya mengadakan aksi damai di depan halaman Kantor DPRD Kota Yogyakarta. Di dalam kegiatan tersebut, beberapa perwakilan buruh gendong diminta untuk maju ke depan dan menceritakan tentang pengalaman dan kehidupannya sebagai seorang buruh gendong.

3. *Performance* (Dampak)

Performance adalah gambaran lebih tinggi dari *output* maupun *outcome*. Di sini digambarkan tentang akibat langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh tercapainya tujuan dari

kegiatan Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong. Tujuan utama dari Kegiatan Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong adalah memberikan pendidikan dan pelatihan (pengorganisasian, penyadaran gender, kepemimpinan, kewirausahaan, kesehatan reproduksi, dll) yang akan membangkitkan jiwa kritis para peserta untuk memperjuangkan hak-haknya. Kemudian apakah sudah ada dampak langsung atau tidak langsung yang dihasilkan dari kegiatan ini, akan terlihat dari penuturan Pak Wahyu dari ICM. Setelah kegiatan ini berakhir beliau menuturkan bahwa terdapat dua orang buruh gendong yang bahkan pada akhirnya menjadi perwakilan untuk *paralegal* di LBH.

Selain hal tersebut, nampaknya belum ada lagi akibat langsung yang diperoleh setelah kegiatan Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong Berakhir. Hingga bulan Mei 2015, ketika diadakan aksi memperingati Hari Buruh Sedunia tuntutan dari buruh gendong dan Yasanti masih sama, yaitu Pemerintah diminta untuk mengakui buruh gendong sebagai pekerja dan menerbitkan kebijakan daerah terkait kerja layak dan akses terhadap sumber daya ekonomi bagi buruh gendong, termasuk kerja layak; dan Pemerintah, pengguna jasa dan

perusahaan memberikan jaminan sosial/ BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, serta Jaminan K3 bagi rakyat pekerja formal dan informal. Jadi dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum ada perbaikan kebijakan dari pemerintah terkait nasib buruh gendong, ataupun pekerja di sektor informal secara umum.

Analisis Responsivitas Gender Kegiatan Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong

1. Level Kesejahteraan: Peningkatan Pendapatan Buruh Gendong

Dari penuturan para buruh gendong sebelumnya, dapat dilihat bagaimana peran kegiatan Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong dalam meningkatkan keberanian mereka dalam menawar upah yang seharusnya mereka peroleh. Bu Isah mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, karena beliau bisa memperoleh keberanian dalam bicara maupun dalam meminta upah yang lebih layak. Meskipun demikian jika disandingkan dengan pendapatan *manool* (buruh gendong laki-laki) hingga saat ini sesungguhnya pendapatan buruh gendong perempuan juga masih rendah.

Setelah kegiatan Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong berakhir, buruh gendong perempuan, Yasanti dan LSM pendukung lain telah mengadakan

aksi damai dan audiensi dengan anggota DPRD Kota Yogyakarta untuk mengajukan tuntutan upah layak dan jaminan kesehatan. Namun hingga saat ini tuntutan tersebut juga masih belum bisa terkabul. Upaya perlindungan kesehatan yang dapat diberikan Yasanti adalah melalui pengobatan gratis yang dilaksanakan bersamaan dengan pengajian Minggu Pon. Selebihnya pihak Yasanti hanya bisa mengupayakan tuntutan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dapat diwujudkan oleh pemerintah setempat.

2. Level Akses: Terbukanya Akses Buruh Gendong pada Sumber Daya Produktif

Sejak awal, pelaksanaan kegiatan Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong memang hanya ditujukan kepada 25 (dua puluh lima) buruh gendong perempuan yang berasal dari 4 (empat) perwakilan pasar yaitu pasar Beringharjo, pasar Giwangan, pasar Kranggan dan pasar Gamping. Hal ini terjadi karena ruang lingkup kerja Yasanti memang hanya berfokus pada buruh perempuan, baik buruh gendong, buruh industri, maupun buruh rumahan. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa buruh gendong perempuan memiliki akses yang lebih baik dibanding *manool* di dalam memperoleh kegiatan pemberdayaan oleh Yasanti.

Telah dijelaskan pula bahwa akses buruh gendong perempuan dalam memperoleh manfaat dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan dari Yasanti, juga jauh lebih terbuka jika dibandingkan dengan buruh gendong laki-laki. Melalui kegiatan pengajian pada Minggu Pon, buruh gendong perempuan dapat memperoleh manfaat seperti pengobatan gratis, koperasi simpan-pinjam, maupun pembagian sembako. Dimana akses tersebut tidak tersedia bagi para buruh gendong laki-laki.

3. Level Kesadaran Kritis: Terbentuknya Kesadaran Kritis Buruh Gendong terhadap Peran Gender

Tujuan utama dari Kegiatan Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong adalah upaya penyadaran akan hak-hak buruh gendong, baik sebagai seorang perempuan maupun sebagai seorang pekerja. Di dalam upaya penyadaran tersebut, para fasilitator berusaha mengambil contoh nyata dari kehidupan sehari-hari para buruh gendong tersebut. Seringkali mereka tidak menyadari permasalahan-permasalahan tersebut. Karena unsur budaya patriarki yang kuat, para buruh gendong perempuan menganggap bahwa apa yang mereka hadapi saat ini adalah sebuah kodrat. Pendidikan ataupun keahlian khusus tidak

dibutuhkan karena sebagai perempuan tugas utama mereka adalah menjadi ibu dan mengasuh anak.

Akan tetapi melalui kegiatan ini, kesadaran kritis dari para buruh gendong perempuan kembali digali melalui beberapa materi pelajaran yang telah disusun sedemikian rupa dan disampaikan oleh fasilitator yang kompeten pula. Sedikit banyak kegiatan ini juga memberikan kesadaran bagi buruh gendong perempuan. Para buruh gendong yang ditemui mengungkapkan bahwa pada akhirnya mereka sadar tentang gender dan apa itu sesungguhnya peran gender.

4. Level Partisipasi: Aksi Damai dan Audiensi dengan Anggota DPRD Kota Yogyakarta

Setelah mendapat pembelajaran yang cukup guna meningkatkan kesadaran kritis, para buruh gendong perempuan diajak berpartisipasi dalam menyuarakan pendapat dan bertemu dengan para anggota DPRD Kota Yogyakarta. Setelah berakhirnya Kegiatan Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong, upaya advokasi terhadap nasib para buruh gendong masih terus dilanjutkan. Pada hari Hak Asasi Manusia Sedunia tanggal 15 Desember 2014, perwakilan buruh gendong dari 4 pasar (Pasar Beringharjo, Pasar Kranggan, Pasar Gamping dan Pasar

Giwangan) didampingi dengan Yasanti dan beberapa LSM pendukung lainnya mengadakan aksi damai di depan halaman Kantor DPRD Kota Yogyakarta. Di dalam kegiatan tersebut, beberapa perwakilan buruh gendong diminta untuk maju ke depan dan menceritakan tentang pengalaman dan kehidupannya sebagai seorang buruh gendong. Beberapa buruh gendong yang maju ada yang nampak malu-malu ketika diminta untuk berbicara di podium. Namun sebagian lain banyak yang terlihat sudah biasa mengungkapkan pendapatnya di depan umum.

Setelah melakukan aksi damai di halaman depan kantor DPRD Kota Yogyakarta, upaya *audiensi* dengan para anggota dewan juga dilakukan oleh perwakilan buruh gendong dan Yasanti. Perwakilan buruh gendong akhirnya dapat bertemu dan menyampaikan segala keluhan kesahnya ke hadapan para anggota dewan, dengan Yasanti sebagai salah satu pendukungnya.

5. Level Kontrol: Kemandirian Buruh Gendong

Disini level antara buruh gendong dan pedagang, maupun pengunjung di Pasar Beringharjo (sebagai pengguna jasa buruh gendong) masih jauh dari setara. Meski setelah berakhirnya kegiatan ini para buruh gendong mengaku lebih berani

menawar upah menggendong mereka, namun pada kenyataannya daya tawar mereka terhadap upah yang lebih baik juga masih sulit terwujud. Analisis profil akses dan kontrol terhadap sumber daya yang ada dapat digunakan untuk melihat siapa yang memiliki peluang dan penguasaan terhadap suatu sumber daya. Meski buruh gendong perempuan mempunyai akses terhadap kegiatan pemberdayaan dari Yasanti, namun belum tentu mereka memiliki kontrol terhadap sumber daya produktif tertentu.

SIMPULAN

Kegiatan Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong yang diselenggarakan oleh Yasanti telah memberikan akses kepada 25 orang buruh gendong perempuan yang menjadi anggota di dalam Paguyuban Sayuk Rukun. Upaya peningkatan kapasitas buruh gendong melalui kegiatan ini pun juga telah dilengkapi dengan modul pembelajaran dan jadwal kelas yang terstruktur. Sekolah diikuti oleh 25 buruh gendong perempuan, dari 6 buruh gendong perempuan yang mengikuti kegiatan sekolah, hanya 2 orang saja yang dapat secara lengkap menjelaskan tentang proses pelaksanaan sekolah dan menceritakan kembali apa saja materi

yang telah diterima. Selain itu, melalui kegiatan ini para buruh gendong juga merasakan pengalaman yang baru yaitu audiensi dengan anggota DPRD Kota Yogyakarta serta dua orang buruh gendong menjadi perwakilan paralegal di LBH.

Selain itu, melalui teknik analisis Longwe juga dapat dilihat bahwa peningkatan kapasitas yang dapat dicapai melalui kegiatan Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong adalah dimensi akses, kesadaran kritis dan partisipasi. Beberapa buruh gendong perempuan yang menjadi anggota paguyuban Sayuk Rukun, di berikan akses untuk mengikuti kegiatan Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong oleh Yasanti. Dari proses pembelajaran ini, maka mulai muncul kesadaran kritis dari para buruh gendong tentang eksistensi mereka, baik sebagai perempuan maupun sebagai seorang pekerja. Dengan serangkaian proses pembelajaran yang telah diberikan, pada akhirnya mereka mulai memiliki keberanian untuk berbicara dan mengungkapkan pendapatannya. Hingga pada akhir tahun 2014, Yasani dan LSM pendukung lainnya mengadakan aksi damai dan audiensi dengan anggota DPRD Kota Yogyakarta.

Namun di dalam menganalisis data, peneliti juga menggunakan perspektif feminisme Marxis dalam mengkaji manfaat apa saja yang seharusnya diperoleh oleh para peserta Kegiatan Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong. Perspektif ini percaya bahwa ketika konsep patriarki dan sistem kapitalisme dunia dikawinkan maka hasilnya adalah opresi besar-besaran terhadap kaum perempuan. Selain itu teori Ekonomi Marxis menambahkan bahwa yang mempunyai kekuasaan lebih besar, mengkoersi pekerja untuk bekerja lebih keras lagi tanpa mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan perbaikan upah.

Feminis Marxis lebih daripada kelompok feminis lain, juga menjadikan kesejahteraan ekonomi dan kemandirian sebagai perhatian utama mereka dan memfokuskan pada persilangan antara pengalaman perempuan sebagai pekerja dan posisi perempuan di dalam keluarga. Namun kedua aspek ini sepertinya belum bisa diperoleh melalui kegiatan ini. Karena hingga berakhirnya kegiatan pemberdayaan ini, keadaan buruh gendong masih jauh dari kesejahteraan dan mereka juga tetap tidak memiliki kontrol terhadap jaminan kesehatan maupun perlindungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arora, Rashmi Umesh. 2012. Gender Inequality, Economic Development, and Globalization: A State Level Analysis of India. *The Journal of Developing Areas*, Vol 46, No 1, 147-164.
- Awan, Shehzadi Zamurrad. 2012. Role of Civil Society in Empowering Pakistani Women. *A Research Journal of South Asian Studies*, Vol. 27, No. 2, pp.439-458.
- Bhat, Bilal Ahmad. 2011. Gender Earnings and Poverty Reduction: Post-Communist Uzbekistan. *Journal of Asian and African Studies*, Vol 46, NO 6, 629-649.
- Boyi, Abubakar Aminu. 2013. Gender Studies and Sustainable Development in Nigeria. *Journal of Educational and Social Research*, Vol 3, No 10, 31-35.
- Carr, Gloria F. 2011. Empowerment: A Framework to Develop Advocacy in African American Grandmothers Providing Care for Their Grandchildren. *International Scholarly Research Network*.
- Claros, Augusto Lopez dan Saadia Zahidi. 2005. Woman Empowerment: Measuring The Global Gender Gap. World Economic Forum. Diakses dari situs : www.weforum.org
- Creswell, John.W. 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daulay, Harmona. tt. Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Pedagang Jamu di Gedung Johor Medan). *Jurnal Harmoni Sosial*, Vol. 1, No. 1
- Darwin, Muhadjir. 2005. *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Fakih, Mansour. 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.
- Fapohunda, Tinuka M. 2012. Gender and Development: Challenges to Women Involvement in Nigeria's Development. *International Journal of Academic Research in Business and Social Science*, Vol 2, No 6, 14-28.
- Fonjong, L., Lawrence Fombe, & Irene Sama-Lang. 2013. The Paradox of Gender Discrimination in Land Ownership and Women Contribution to Poverty Reduction in Anglophone Cameroon. *Geo Journal*, Vol 78, 575-589.
- Fukuyama, Francis. 2005. *Memperkuat Negara: Tata Pemerintah dan Tata Dunia Abad 21*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Gatot, Raden Yulianus. 1999. *Motivasi Kerja Buruh Gendong dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Penelitian di Pasar Beringharjo, Kotamadya Yogyakarta Provinsi DIY)* (Tesis). Yogyakarta: UGM.

- Gyeke, Mavis Dako & Prince Owusu. 2013. A Qualitative Study Exploring Factors Contributing to Gender Inequality in Rural Ghana. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol 4, 481-489.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2008. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.
- Heintz, James. 2006. *Globalization, Economic Policy and Employment: Poverty and Gender Implication*. Employment Policy Unit, Employment Strategy Department, ILO, Geneva.
- Hidayah, Nur. 2007. Eksistensi Buruh Gendong Sebagai Pilihan Pekerjaan di Sektor Informal (Studi Kasus di Pasar Giwangan, Yogyakarta). *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.4, No.2, Hal.27-47.
- Horn, Zoe. 2010. No Cushion to Fall Back On: Global Recession and Informally Employed Women in the Global South. *Women Policy Journal of Harvard*, Vol.7, 23-38.
- ILO. 2004. *Global Employment Trends for Women*. Geneva: International Labour Office
- ILO. 2011. *Penilaian Landasan Perlindungan Sosial Berdasarkan Dialog Nasional di Indonesia: Menuju Landasan Perlindungan Sosial*. Jakarta: ILO
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2011. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah Responsif Gender*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Mahmood, Nehdia., et al. 2014. Socio-Economic Effect of Globalization on Working Women in Sargodha City Pakistan. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol 5, No 3, 561-567.
- Mayoux, Linda. 2001. *Gender Equity, Equality, and Women's Empowerment: Principle, Development and Framework*. Aga Khan Foundation. Diakses dari situs <http://www.genfinances.net>.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muftiyanah, Amin (dkk), Pamuji, (ed). 2003. *Profil Endong-endong Pasar Beringharjo*. YASANTI: Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhaeni Ismi Dwi Astuti. 2010. *Kebijakan Publik Pro Gender*. Surakarta: UNS Press.
- Oberhauser, Ann M. & Muriel A.Yeboah. 2011. *Heavy Burdens: Gendered Livelihood Strategies of Porters in Accra, Ghana*. *Singapore Journal of Tropical Geography* 32, 22-37.

- Oberhauser, Ann M. 2010. (Re)Scaling Gender and Globalization: Livelihood Strategies in Accra, Ghana. *ACME: An International E-Journal for Critical Geographies*, 9 (2), 221-244.
- Omoyibo, Kingsley Ufuoma & Ben Ibukun Ajayi. 2011. *Understanding Gender and Global Africa: A Critical Perspective*. *Gender & Behaviour*. 9 (1), 3729-3751.
- Prahara, Sowanya Ardi. 2010. *Makna Kerja Pada Buruh Gendong Perempuan di Pasar Peringharjo Yogyakarta (Sebuah Studi Fenomenologi)* (Tesis). Yogyakarta: UGM.
- Pratikno. 2005. Good Governance and Governability. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8 No. 3.
- Ransom, Elizabeth & Carmen Bain. 2011. Gendering Agricultural Aid: An Analysis of Whether International Development Assistance Targets Women and Gender. *Gender and Society*, Vol 25, No 1, 48-74.
- Rokicka, Magdalena and Anna Ruzik. 2010. *The Gender Pay Gap in Informal Employment in Poland*. *CASE Network Studies & Analyses* No. 406, pp. 1-46.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Pemerintah yang Baik) Bagian Kedua: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Stiglitz, Joseph E. 2006. *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subono, Iman Nur. 2003. Civil Society, Patriarki, dan Hegemoni. *Civic*, Vol,1 No.2.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sumodiningrat, G. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Syadzily, TB Ace Hasan dan Burhanuddin (editor). 2003. *Civil Society dan Demokrasi: Survey Tentang Partisipasi Sosial-Politik Warga Jakarta*. Jakarta: INCIS.
- Tong, Rosemarie Putnam. 2010. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra.